

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Sejak 2010, sektor industri terus memberikan kontribusi terbesar pada PDB nasional, bahkan di kala puncak pandemi yang terjadi pada tahun 2020-2021. Pencapaian ini tentu tidak terlepas dari performa kinerja dari suatu perusahaan. Dari perspektif sumber daya perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan dapat memperoleh kinerja yang unggul apabila mengungkapkan sumber daya keuangan dan non-keuangan. Sumber daya inilah yang akan membantu perusahaan dalam mengembangkan kemampuan dan kompetensinya agar mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Gaur *et.al.*, 2011).

Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik akan mampu untuk terus hidup dan bertahan. Sebaliknya, perusahaan dengan kinerja keuangan yang buruk, akan mengalami pergolakan dan perlahan akan mati (Widjaja, 1996). Kinerja keuangan merupakan kunci utama untuk mengukur baik atau buruknya kinerja dari suatu perusahaan yang dilihat dari laporan keuangannya. Parameter umum yang digunakan dalam mengevaluasi suatu kinerja perusahaan yaitu melalui laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dimana dalam laporan keuangan tersebut berisi tentang aspek pendanaan maupun penyaluran dana. Pengukuran yang digunakan biasanya diukur dengan solvabilitas, likuiditas dan profitabilitas (Murti *et.al.*, 2016). Adapun rasio keuangan dijadikan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengetahui posisi keuangan dan pencapaian perusahaan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Cahya *et.al.*, 2021). Rasio



keuangan inilah yang menjadi gambaran mengenai nilai suatu perusahaan. Di samping itu, rasio keuangan juga berguna bagi para investor sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis perusahaan dalam memperoleh laba berdasarkan saham yang dimiliki (Anita & Anggreni, 2021).

Perusahaan yang kian terus meningkat dari tahun ke tahun dituntut agar dapat mempertahankan kinerjanya yang terhubung melalui perdagangan dan investasi, terutama pertumbuhan perusahaan multinasional dari negara maju (Li & Gaur, 2014). Hal ini menimbulkan isu tentang apa yang harus diungkapkan dan jenis pelaporan apa yang harus dilaporkan bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) nasional dan internasional agar pengungkapan tersebut menjadi lebih penting, bukan hanya untuk kepentingan *stakeholders* tapi juga untuk para pembuat kebijakan di seluruh dunia. Dengan demikian, akuntansi keuangan tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan para pemegang saham (*shareholders*); laporan yang telah dibuat lebih jauh berkembang seperti laporan modal intelektual, pelaporan nilai, dan laporan keberlanjutan (Wulf *et.al.*, 2014).

Salah satu cara yang paling mudah dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan yaitu melalui analisis rasio keuangan, seperti rasio profitabilitas. Namun rasio profitabilitas memiliki kelemahan yaitu mengabaikan adanya modal. Hal ini menyebabkan kesulitan untuk mengetahui apakah perusahaan berhasil menciptakan nilai atau tidak (Ningsih & Hermanto, 2015). Beberapa penelitian yang menguji tentang kinerja keuangan pada sektor pertambangan diantaranya, Anggraeni (2019); Rumerung & Alexander (2019); Cahyono & Yunita (2020); Aini & Putranto (2021); Budi *et.al.*, (2021); Ardiani & Sriwardany (2021); Rizal *et.al.*, (2022); Ali (2022); Anozie *et.al.*, (2023). Hampir seluruh penelitian sebelumnya

an rasio yang sama, yakni rasio profitabilitas dan rasio likuiditas dalam kinerja keuangan perusahaan. Ukuran tersebut menurut peneliti belum



mencerminkan kinerja keuangan perusahaan secara maksimal. Untuk mengatasi hal itu, maka dikembangkan suatu pendekatan baru dalam menilai kinerja perusahaan yaitu dengan *Economic Value Added* (EVA) yang pertama kali diperkenalkan oleh Stern Stewart & Co. dari sebuah perusahaan di Amerika yang mana perusahaan ini beranggapan bahwa EVA adalah kunci dalam menciptakan nilai perusahaan. Hal ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan AS dan beberapa negara lain yang berhasil menciptakan kekayaan bagi para *stakeholders*-nya (Hendrata, 2001). Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengangkat kinerja keuangan dengan indikator pengukuran menggunakan pendekatan EVA.

Kemenperin berkomitmen bersama para pemangku kepentingan terkait lainnya akan mewujudkan industri nasional yang tangguh dan berkelanjutan. Upaya ini misalnya dengan menerapkan praktik-praktik yang mengukung konsep Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola Perusahaan atau Environmental, Social, Governance (ESG). Menilik data BPS pada Triwulan IV tahun 2022, ada tiga sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB, yakni sektor industri pengolahan (*manufacturing industry*), sektor perdagangan (*wholesale and retail trade*), dan sektor pertambangan (*mining and quarrying*) yang masing-masing berkontribusi sebesar 18,32%, 12,77%, dan 12,65%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sektor manufaktur lebih besar dari dua sektor lainnya. Padahal hampir 90% aktivitas manusia melibatkan barang yang berasal dari barang tambang dimana tambang inilah yang akan mengantarkan ke zaman *civilization*, ungkap Tony Wenas selaku pembicara utama dalam diskusi *Mining Talk* di FEB UGM pada Oktober 2019 lalu.



Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi cadangan mineral gi dan penghasil tambang terbesar di dunia. Pada mineral nikel ndonesia menempati posisi tiga teratas tingkat global. Selain itu,

Indonesia mencatat kontribusi sebesar 39% untuk produk emas dan berada di posisi kedua setelah China. Hal ini berarti bahwa hampir sebagian besar kehidupan yang dijalani tidak lepas dari sentuhan pertambangan. Namun tidak dipungkiri bahwa bukan hanya perusahaan pertambangan, tetapi perusahaan manufaktur dan perusahaan perdagangan juga mengacu pada prinsip-prinsip keberlanjutan dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan hal itu, peneliti ingin mengangkat tiga sektor ini, yakni sektor manufaktur, sektor perdagangan, dan sektor pertambangan, yang turut andil dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia yang masih jarang diteliti oleh para peneliti sebelumnya dalam kaitannya dengan kinerja keuangan industri saat ini.

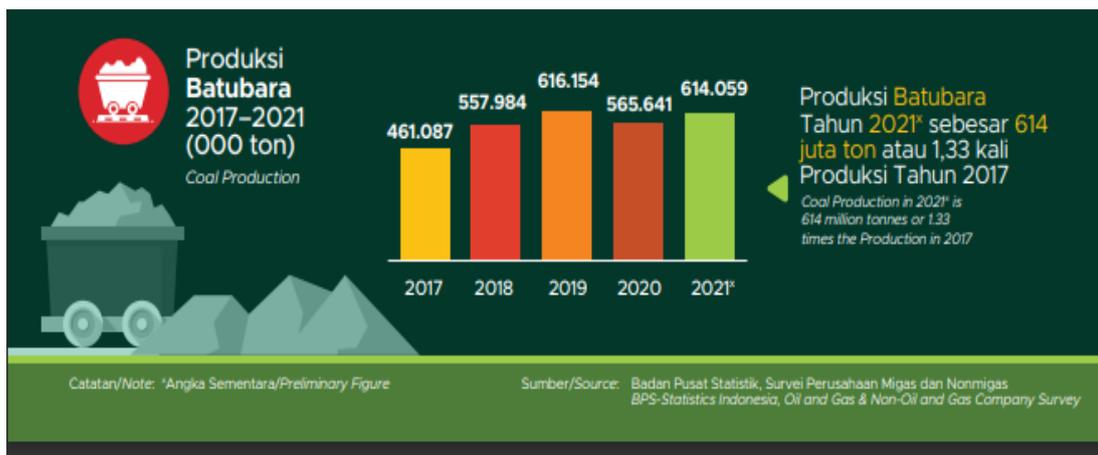
Dikutip data dari Badan Pusat Statistik di mana menunjukkan pertumbuhan produksi pada tahun 2017-2021 yang dapat dilihat pada gambar 1.1 dan gambar 1.2 berikut.



PS, Statistik Indonesia 2023

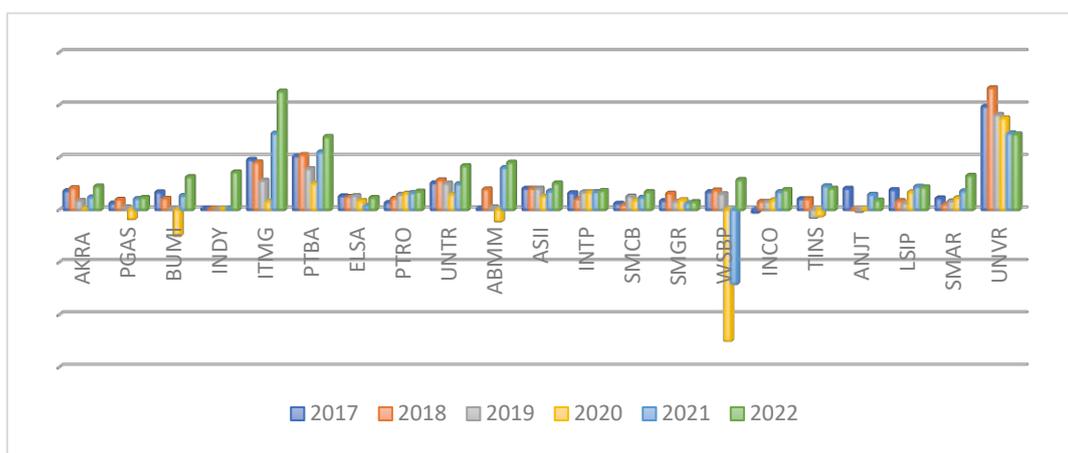
ar 1.1: Pertumbuhan Produksi Migas Indonesia 2017-2021 (dalam persen)





Gambar 1.2: Pertumbuhan Produksi NonMigas Indonesia 2017-2021

Pada gambar 1.1 dan gambar 1.2 merepresentasikan pertumbuhan produksi migas dan nonmigas yang mengalami fluktuatif dan cenderung menurun. Ditambah lagi kondisi ekonomi dunia yang diperkirakan di ambang resesi pada 2023. Kondisi ini tentu memaksa manajemen perusahaan pertambangan berpikir lebih keras agar kinerja tetap sehat. Namun belum ada wacana berkelanjutan yang bisa dijadikan sebagai alat untuk mengukur kinerja. Perusahaan dinilai sehat atau tidak salah satunya dapat dilihat melalui kinerja keuangan perusahaan, salah satunya melalui *Return on Asset (ROA)* seperti yang digambarkan pada gambar 1.3 berikut.



Data diolah, 2024

Gambar 1.3 Grafik Kinerja Keuangan Industri Perusahaan 2017-2022



Pada gambar 1.3 diperoleh informasi bahwa perusahaan yang memiliki kinerja paling stabil hingga mengalami peningkatan kinerja adalah ITMG, PTBA, PTRO, UNTR, ASII, INTP, SMAR, dan UNVR. Sementara perusahaan yang mengalami kinerja yang paling buruk hingga mengalami kemerosotan adalah SMGR, WSBP, dan ANJT. Selain itu, hampir sebagian besar perusahaan industri mengalami penurunan kinerja pada tahun 2019-2021 kemudian perlahan membaik di tahun 2022. Di tahun tersebut dunia mengalami pandemi Covid-19 yang dialami oleh perusahaan yang ada di Indonesia, tetapi juga berdampak di seluruh dunia. Untuk itu, pihak manajemen perlu mengambil langkah guna meningkatkan kinerja perusahaannya, salah satunya dengan mengungkapkan laporan keberlanjutan (*sustainability report*).

Praktik *sustainability reporting* (SR) telah berkembang secara signifikan selama dua dekade terakhir, terutama sejak adanya kesadaran global akan krisis ekologi dan kepentingan bersama dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang bergerak maju dalam memantau perkembangan aktivitasnya mengenai dampak terhadap sosial dan lingkungan hidup, maka praktik SR telah menjadi praktik arus utama (Boiral *et.al.*, 2017; Fonseca *et.al.*, 2014). Hal ini menjadi tren di kalangan internasional disebabkan karena kurangnya pengungkapan non-keuangan perusahaan, seperti informasi dan praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) (Li *et.al.*, 2018). Permintaan investor terhadap informasi non-keuangan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi LST yang terstandarisasi. Melalui kerangka kerja inilah akan menghasilkan aksesibilitas data yang dapat digunakan investor untuk mengevaluasi implikasi keberlanjutan dari alokasi modalnya (Bose, 2020).



sustainability reporting merupakan suatu publikasi informasi yang dapat kinerja organisasi terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola

(ACCA, 2013). Di samping menyampaikan metrik keuangan (neraca, laba rugi, dan arus kas) dalam *sustainability report* juga melaporkan berbagai praktik terkait dimensi ESG (*Environment, Society, and Governance*). Pengungkapan informasi oleh sebuah perusahaan merupakan landasan utama bagi para investor untuk mendukung pengambilan keputusan investasi yang aman dan menguntungkan. Informasi yang diperlukan investor bukan hanya mengenai informasi keuangan saja namun juga informasi non-keuangan (Martínez-Ferrero *et.al.*, 2015). Pergeseran paradigma bisnis dimana hanya informasi non-keuangan perlu diungkapkan, mempengaruhi perusahaan untuk menyajikan informasi tersebut dalam bentuk yang lebih komprehensif (Maas *et.al.*, 2016).

Sejalan dengan Elkington (1997) yang mengemukakan bahwa *sustainability report* bukan hanya memuat informasi kinerja keuangan namun juga memuat tentang informasi non-keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan sehingga memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan (*sustainable performance*). Dalam bukunya yang berjudul "*The Cannibals with Forks*", Elkington (1997) menjelaskan yang menjadi esensi dari konsep *Triple Bottom Line* (TBL) yang dikembangkan oleh Elkington adalah 3P (*people-planet-profit*), dimana *sustainability* (keberlanjutan) merupakan keseimbangan antara tiga aspek, yakni *people (social)*, *planet (environment)*, dan *profit (economic)*. Oleh sebab itu, perusahaan harus bertanggung jawab atas aktivitasnya dan meminimalkan kerugian atas dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lebih lanjut Hamsir *et.al.*, (2021) mengemukakan bahwa perusahaan dituntut tidak hanya mengutamakan nilai perusahaan yang tercermin dari kondisi ekonomi (keuangan/laba) tetapi lebih berpijak pada aspek 3P.



1 Nations Sustainable Stock Exchange menegaskan bahwa semua yang terdaftar diharapkan untuk mengungkapkan dampak dari praktik

lingkungan, sosial dan tata kelola (LST/ESG) paling lambat pada tahun 2030 (*Sustainable Stock Exchange*, 2015). Karena informasi LST adalah pengungkapan yang bersifat non-keuangan dan tidak mengejar format standar seperti pengungkapan keuangan, maka pengungkapan LST cenderung bervariasi secara signifikan (Elzahar *et.al.*, 2015). Terkait hal ini, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa pengungkapan LST bervariasi antar perusahaan dan negara (Ioannou & Serafeim, 2017; Reverte, 2009). Hal ini dikarenakan adanya kebebasan konten informasi dan format yang tidak seragam yang diungkapkan oleh manajemen. Seperti yang diungkapkan oleh Duuren *et.al.* (2016) yang menemukan bahwa para manajer Eropa memandang LST dengan cara yang berbeda secara substansial. Adapun Baldini *et.al.* (2016) berpendapat bahwa faktor spesifik negara seperti tata kelola, tenaga kerja dan ekonomi secara signifikan mempengaruhi pengungkapan LST perusahaan.

Menurut survei yang dilakukan oleh KPMG pada 2020, 80% dari perusahaan TOP 100 di 52 negara telah mengadopsi standar *sustainability reporting*. Survei yang dilakukan GlobeScan & GRI pada 27.000 responden di 27 negara menunjukkan 51% responden percaya bahwa *sustainability reporting* akan menguatkan kepercayaan publik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Ernst & Young (2013) yang menyatakan bahwa reputasi dan kepercayaan perusahaan yang tinggi di mata konsumen berdampak pada loyalitas yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Investor lebih memilih untuk berinvestasi pada perusahaan yang transparan karena adanya kepercayaan yang tinggi kepada pihak manajemen akan keakuratan peramalan analisis dan asimetri informasi yang lebih rendah.



sunan *sustainability report* tentu memiliki sebuah standar. *Global initiative* (GRI) sebagai pemegang kendali dalam *sustainability report* di

dunia telah mengembangkan suatu kerangka dalam penyusunan pelaporan keberlanjutan. Versi terakhir yang dikembangkan dari pedoman *sustainability report* yakni GRI-G4. Standar ini merupakan praktik pelaporan organisasi secara transparan yang memuat mengenai informasi akan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, juga dianggap sebagai suatu kontribusi, baik positif maupun negatif, terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui proses ini pula, maka organisasi dapat mengidentifikasi dampak terhadap ekonomi, sosial (masyarakat) dan lingkungannya sesuai dengan standar yang diterima secara global. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi yang menjelaskan bahwa suatu perusahaan akan terus mengikuti perkembangan norma yang muncul di masyarakat. Untuk mendapatkan *legitimate*, perusahaan harus melakukan pengungkapan lingkungan sosial perusahaannya.

Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan variasi dalam penerapan praktik pelaporan standar di antara berbagai negara (Pineiro-Chousa *et.al.*, 2019; Booklaky *et.al.*, 2018). Meskipun penerapan praktik pelaporan -yang masih bersifat sukarela- tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan dari waktu ke waktu, namun organisasi bisnis di negara berkembang masih belum menyadari kebutuhan serta permintaan praktik pengungkapan berkelanjutan (Agyei & Yankey, 2019; Beck *et.al.*, 2018; Mukherjee & Nuñez, 2019; Aboud & Diab, 2018). Selain itu, tidak mungkin menggeneralisasi hasil penelitian dari negara maju ke pasar negara berkembang karena perbedaan masyarakat sipil, pengembangan kebijakan, kerangka peraturan, sistem kelembagaan dan harapan pemangku kepentingan (Kuzey & Uyar, 2017; Uddin *et.al.*, 2017; Belal & Owen, 2007).



Pada hal manfaat dari *sustainability reporting* yang disampaikan dalam k (ACCA, 2013) di Singapura lalu menyatakan secara signifikan terkait ta bahwa *sustainability reporting* mendorong pemantauan kinerja

dimana sebelumnya tidak ada, membuat hal itu dapat berguna di masa yang akan datang, seperti peningkatan bisnis, peningkatan kepercayaan dan reputasi perusahaan, dan penilaian risiko non-keuangan. Hal ini juga diungkapkan oleh Laskar dan Santi (2018) bahwa perusahaan yang berfokus pada *sustainability reporting* dapat meningkatkan kinerja keuangan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan hubungan dengan *stakeholder*. Namun yang menjadi hambatan dalam pelaporan dipengaruhi berbagai persyaratan kerangka penyusunan yang semakin berkembang, kurangnya dukungan manajemen, sumber daya yang dibutuhkan, dan pengembalian investasi yang tidak berwujud.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik *sustainability report* menjadi penting untuk dilakukan disebabkan karena adanya pergeseran paradigma perusahaan dimana yang sebelumnya mengutamakan *profit maximization* (memaksimalkan keuntungan) beralih ke *triple bottom line* (*people, profit, and planet*) yang telah menyadarkan bahwa kinerja keuangan saja tidak cukup kuat tanpa dukungan kinerja lingkungan dan sosial.

Berbagai studi empiris telah mencoba membuktikan bagaimana penerapan *sustainability reporting* mempengaruhi kinerja perusahaan. Namun masih terdapat hasil penelitian yang beragam. Hasil penelitian Kasbun *et.al.*, (2016) ; Wijayanti (2016); Suciwati *et.al.*, (2016); Loh *et.al.*, (2017); Kuzey & Uyar (2017); Bukhori & Sopian, (2017); Yang *et.al.*, (2019); Albitar *et.al.*, (2020); Machmuddah *et.al.*, (2020); Sallata *et.al.*, (2020) menemukan hubungan yang positif mengenai pengaruh *sustainability reporting* terhadap financial performance. Sebaliknya, Nor *et.al* (2016); Famiyeh (2017); Karyawati *et.al.*, (2017); Buallay (2019); Wasara & Ganda (2019); Pramukti & Buana (2019); Miles & Ringham (2020), menemukan bahwa *sustainability reporting* tidak memiliki pengaruh terhadap financial performance. Perbedaan hasil dari penelitian ini membuka peluang bagi penelitian



selanjutnya untuk perlunya melakukan pembuktian lebih lanjut dalam menjelaskan peranan *sustainability reporting* terhadap *financial performance*.

Isu tentang *sustainability* di Indonesia, yang merupakan negara berkembang, belum berada pada mengukur *sustainable performance* (kinerja keberlanjutan), namun masih sebatas pada memenuhi kewajiban yang telah diatur oleh Undang-Undang (Putri & Sari, 2019). Hal ini berarti bahwa masih sangat sedikit dijumpai sektor yang berinisiatif dalam menyusun dan mengungkapkan *sustainability report*. Dengan kata lain, sifatnya masih sukarela. Adhipradana & Daljono (2013) menemukan bahwa ada tiga faktor yang membuat perusahaan enggan membuat *sustainability report*, pertama adalah karena perusahaan tidak transparan dalam menjalankan bisnisnya. Kedua, perusahaan menganggap *sustainability report* sebagai sebuah biaya tambahan. Dan ketiga, belum ada suatu peraturan yang mewajibkan suatu perusahaan untuk merilis *sustainability report* atau dalam hal ini masih bersifat *voluntary* (sukarela). Hal ini berbanding terbalik dengan fenomena yang terjadi di beberapa negara lain, seperti di China, Denmark, Afrika, dan Malaysia (Ioannou & Serafeim, 2017). Di negara-negara tersebut, pemerintah setempat telah mewajibkan setiap perusahaan, baik perusahaan BUMN maupun perusahaan terbuka, untuk membuat *sustainability report*.

Saat ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 di mana pada pasal 4 bertuliskan bahwa perusahaan yang *Go public* wajib melaporkan *sustainability report* setiap tahun pada waktu yang sama kepada OJK. Jika pada penelitian terdahulu umumnya menggunakan pengukuran

RI dalam mengukur *sustainability reporting*, maka dalam penelitian ini, dengan mengacu pada regulasi dari OJK melalui SEOJK No.16 Tahun



2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Bagi Emiten dan Perusahaan Publik dimana hal ini merupakan lanjutan (*upgrade*) dari Peraturan No.51/POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Pengukuran dengan cara ini menurut peneliti dapat lebih mendorong perusahaan, khususnya di Indonesia, dalam menerbitkan laporan berkelanjutan. Terbukti setelah dikeluarkannya peraturan ini, antusiasme yang ditunjukkan oleh para emiten/perusahaan dalam menerbitkan SR di tahun 2021 meningkat pesat sebanyak 642% dari yang sebelumnya hanya 21 perusahaan menjadi 156 perusahaan. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik menggunakan pengukuran SR melalui pedoman SEOJK No.16 Tahun 2021.

Lebih lanjut diterangkan dalam SEOJK No.16 Tahun 2021 bahwa dalam rangka penerapan keuangan berkelanjutan, maka laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) memuat informasi mengenai kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu Lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik dalam menjelaskan bisnis berkelanjutan.

Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang semakin meningkat menuntut agar dapat menjalankan bisnisnya dengan sebaik mungkin guna memperoleh keuntungan. Guna memberikan informasi yang transparan, akuntabel dan tata kelola yang bagus (*good corporate governance*) sehingga memaksa perusahaan untuk memberikan informasi terkait aktivitas sosialnya. Hampir seluruh perusahaan yang ada di setiap negara dituntut untuk menjaga keberlangsungan lingkungan dan ekosistem, sehingga diperlukan adanya *sustainability report* (laporan keberlanjutan).

Pada dasarnya, tujuan perusahaan yaitu meningkatkan kemakmuran ra *stakeholder*-nya yang ditentukan dari kinerja perusahaan, terutama keuangan. Pemegang saham cenderung mengoptimalkan nilai saham



dan mendorong manager agar bertindak sesuai dengan kehendak mereka. Untuk itu, diperlukan adanya *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai bentuk upaya dalam menciptakan hubungan yang kondusif antar *stakeholder*, dimana hal ini merupakan prasyarat dalam mewujudkan peningkatan nilai perusahaan. Selain berfungsi sebagai nilai tambah bagi para *shareholders* secara berkelanjutan dalam jangka panjang, GCG pun merupakan suatu bentuk kepatuhan perusahaan terhadap sejumlah peraturan yang mendorong terjadinya praktik dan hubungan bisnis yang baik agar selaras dengan tata kelola perusahaan dalam dunia bisnis yang dinamis. Batas dan norma sosial mungkin berubah dari waktu ke waktu, sehingga perusahaan secara berkelanjutan memperlihatkan bahwa kegiatan operasinya sesuai dengan batas dan norma tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Brown dan Deegan (1998) bahwa legitimasi tercipta karena adanya kontrak sosial yang secara tidak langsung bergantung pada luas batas dan norma sosial yang dijalankan perusahaan.

Pada pertengahan tahun 1997, beberapa negara di Asia dilanda krisis ekonomi. Penyebab krisis ekonomi di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, adalah mekanisme pengawasan dewan komisaris (*board of director*) dan komite audit (*audit committee*) di perusahaan yang tidak berfungsi efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham (Sulistyanto dan Wibosono, 2003). Hal ini diidentifikasi sebagai akibat dari buruknya kinerja perusahaan dan minimnya daya saing perusahaan di negara-negara tersebut serta lemahnya proteksi terhadap investor (Pratiwi, 2010). Selain krisis ekonomi, terdapat skandal keuangan perusahaan yang dialami oleh perusahaan besar di dunia seperti perusahaan Lehman Brothers dan Goldman Sach di tahun 2008. Kemudian di tahun 2012, terdapat skandal keuangan pada lembaga keuangan seperti JP Morgan, Barclays, dan lain sebagainya. Kasus skandal tersebut sebagai bukti bahwa adanya



kinerja keuangan yang buruk yang dikarenakan kurangnya proteksi terhadap investor dan tidak adanya transparansi dalam pelaporan keuangan sehingga menyebabkan asimetri informasi antara *principal* dan *agent*.

Hal serupa juga dialami oleh Enron, WorldComm, Tyco, Marsh & McLennan, dan Dick Grasso yang telah merugikan para *stakeholder*. Kondisi tersebut seolah mengatakan bahwa struktur perusahaan yang polos, yang terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris tanpa disertai penjelasan yang lebih terinci mengenai tugas, tanggung jawab serta apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh direksi, tidaklah cukup untuk meyakinkan pemegang saham bahwa direksi akan bekerja untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham dan komisaris akan bekerja secara cukup untuk mengawasi direksi. Hal ini didukung oleh hasil penelitian majalah *Fortune* yang menyatakan bahwa sebagian besar dewan komisaris hanya berfungsi sebagai tukang stempel (40%), diikuti oleh komisaris yang bekerja mengawasi dan mengontrol direksi secara aktif (30%) dan komisaris yang mengawasi dan mengontrol direksi pada tingkat minimal saja (Sitorus, 2006).

Belajar dari beberapa skandal yang terjadi, perusahaan membutuhkan pihak-pihak atau kelompok untuk mengawasi implementasi kebijakan direksi. Maka prinsip *corporate governance* perlu diperkuat dengan menempatkan lebih banyak orang yang independen, di mana mereka bekerja dalam bentuk komite-komite yang bertugas untuk menyeimbangkan energi untuk melakukan inovasi yang dimiliki oleh Direksi sebagai suatu bentuk pengawasan terhadap manajemen agar sejalan dengan kepentingan pemilik perusahaan. Sehingga dewan komisaris dan komite audit merupakan bagian pokok dalam mekanisme *corporate governance*.



Research gap dalam penelitian ini menggunakan dewan komisaris dan komite audit sebagai variabel moderasi pada hubungan *my report* dengan *financial performance*. Mayoritas penelitian menguji

pengaruh langsung hubungan GCG termasuk dewan komisaris dan komite audit dengan kinerja keuangan (Sari & Sedianingsih (2014); Sarafina & Saifi (2017); Shahab *et.al.*, (2019); Arayssi *et.al.*, (2020); Pratiwi & Bahari (2020); Rizki & Wuryani (2021). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Effendy (2015); Sallata *et.al.*, (2020); Fitriyaningsih & Asfaro, (2022); Sari & Setyaningsih, (2023) menemukan bahwa antara dewan komisaris dan komite tidak signifikan dengan *financial performance*. Namun penelitian lain menemukan hal yang sebaliknya (Nurhidayanti & Efrianti, 2023; Mulyanti dkk, 2023, Andriani & Trianingsih, 2023, Baharuddin, 2022, dan Wardani & Zulkifli, 2017).

Penelitian tentang GCG pada bidang *financial performance* sangat melimpah. Namun penelitian yang menguji hubungan kausalitas *sustainability report* terhadap *financial performance* yang dimoderasi dewan komisaris independen dan komite audit seperti dalam penelitian ini, belum peneliti temukan. Atas dasar pertimbangan ini kemudian belajar dari kasus-kasus sebelumnya yang menimpa perusahaan besar dan ternama di luar sana kemudian disertai dengan adanya inkonsistensi dari hasil-hasil penelitian terdahulu maka peneliti mencoba mengembangkan penelitian sebelumnya dengan mengadopsi penelitian dari Clarissa & Rasmini (2018) yang mana dalam penelitian mereka GCG diukur dengan CGPI dan SR menggunakan GRI. Sementara dalam penelitian ini menggunakan dewan komisaris dan komite audit sebagai variabel moderasi dan pengukuran SR menggunakan pedoman dari SEOJK No.16 Tahun 2021.

1.2 Rumusan Masalah



sarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan
 k pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Apakah *sustainability report* aspek kinerja ekonomi berpengaruh terhadap *financial performance*?
- 2) Apakah *sustainability report* aspek kinerja lingkungan berpengaruh terhadap *financial performance*?
- 3) Apakah *sustainability report* aspek kinerja sosial berpengaruh terhadap *financial performance*?
- 4) Apakah dewan komisaris independen mampu memoderasi hubungan *sustainability report* pada aspek kinerja ekonomi terhadap *financial performance*?
- 5) Apakah dewan komisaris independen mampu memoderasi hubungan *sustainability report* pada aspek kinerja lingkungan terhadap *financial performance*?
- 6) Apakah dewan komisaris independen mampu memoderasi hubungan *sustainability report* pada aspek kinerja sosial terhadap *financial performance*?
- 7) Apakah komite audit mampu memoderasi hubungan *sustainability report* pada aspek kinerja ekonomi terhadap *financial performance*?
- 8) Apakah komite audit mampu memoderasi hubungan *sustainability report* pada aspek kinerja lingkungan terhadap *financial performance*?
- 9) Apakah komite audit mampu memoderasi hubungan *sustainability report* pada aspek kinerja sosial terhadap *financial performance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pengaruh *sustainability report* dengan *financial performance* yang diuraikan sebagai



- 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh aspek kinerja ekonomi terhadap *financial performance*.
- 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh aspek kinerja ekonomi terhadap *financial performance*.
- 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh aspek kinerja sosial terhadap *financial performance*.
- 4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh aspek kinerja ekonomi yang dimoderasi dewan komisaris independen terhadap *financial performance*.
- 5) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh aspek kinerja lingkungan yang dimoderasi dewan komisaris independen terhadap *financial performance*.
- 6) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh aspek kinerja sosial yang dimoderasi dewan komisaris independen terhadap *financial performance*.
- 7) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh aspek kinerja ekonomi yang dimoderasi komite audit terhadap *financial performance*.
- 8) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh aspek kinerja lingkungan yang dimoderasi komite audit terhadap *financial performance*.
- 9) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh aspek kinerja sosial yang dimoderasi komite audit terhadap *financial performance*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi dunia penelitian karena hingga saat ini masih terdapat inkonsistensi baik secara teoritis maupun empiris mengenai hubungan antara *sustainability report* dengan *financial performance*. Secara teoritis, analisa



untuk memahami kesinambungan laporan berkelanjutan terhadap ingan. Pemahaman ini penting untuk melihat sejauh mana peranan jika

menggunakan standar/pedoman SEOJK No.16 Tahun 2021 yang dijadikan sebagai acuan dalam membuat laporan berkelanjutan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para emiten atau perusahaan publik agar mempertimbangkan kembali mengenai *sustainability reporting* demi kelangsungan usahanya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Setiap penelitian ilmiah dihadapkan pada persoalan dimensi waktu, dimensi wilayah atau lokasi penelitian dan dimensi pembiayaan. Dalam penelitian disertasi ini yang berjudul analisis peran *sustainability reporting* terhadap *financial performance* melalui dewan komisaris independen dan komite audit sebagai pemoderasi, maka ruang lingkup penelitian ini adalah Indonesia dimana menggunakan sumber data dari laporan tahunan pada Industri Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk emiten di IDX-IC (*Indonesia Stock Exchange Industrial Classification*) pada sektor perdagangan, manufaktur dan pertambangan dan berbagai sumber data yang terkait lainnya dalam rentang waktu penelitian dari tahun 2017-2022.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusun suatu sistematika penulisan yang berisi informasi, mengenai materi yang dibahas pada setiap bab, yang terdiri dari:



dahulu. Bab ini merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi an gambaran permasalahan yang singkat. Bab ini berisi latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan landasan teori dan penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan, kerangka pemikiran serta hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini.

Bab III Kerangka Konseptual. Bab ini menguraikan tentang definisi operasional dan variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang dikumpulkan, metode pengumpulan data, dan metode analisisnya.

Bab IV Metode Penelitian. Bab ini menguraikan tentang definisi operasional dan variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang dikumpulkan, metode pengumpulan data, dan metode analisisnya.

Bab V Hasil dan Pengujian Hipotesis. Bab ini menguraikan tentang gambaran hasil dan metode analisis yang mencakup deskripsi dari objek yang diteliti dan hasil uji analisisnya.

Bab VI Pembahasan. Bab ini menguraikan tentang penjelasan dan interpretasi mengenai hasil perhitungan atau analisis data pada bab sebelumnya.

Bab VII Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi dan keterbatasan penelitian, serta saran yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan bagi penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 *Legitimacy Theory*

Penelitian ini melandaskan teori legitimasi sebagai *based theory*. Teori legitimasi menyandarkan dugaan bahwa terdapat kontrak sosial antara organisasi dengan masyarakat tempat organisasi beroperasi dimana organisasi tersebut secara kontinyu akan beroperasi sesuai dengan batas-batas dan nilai yang diterima oleh masyarakat di sekitar perusahaan dalam usaha untuk mendapatkan legitimasi. Teori legitimasi didasarkan pada konsep “kontrak sosial” (Mathews, 1993; Patten, 1992) dimana perusahaan memberikan informasi dalam pengungkapan non-keuangan untuk melegitimasi kegiatan mereka dan konsisten dengan konsep kewarganegaraan korporat (Hooghiemstra, 2000); Brammer & Pavelin, 2006). Jika terjadi perbedaan norma dan nilai yang dianut masyarakat dapat mengancam posisi perusahaan (Dowling & Pfeffer, 1975). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dasar teori legitimasi sebagai *grand theory*.

Adapun cara atau media yang efektif untuk mendapatkan legitimasi adalah dengan pengungkapan *sustainability report* yang memaparkan tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan. Teori legitimasi memberikan pandangan terhadap pengungkapan informasi sosial baik positif maupun negatif. Perusahaan yang terus berusaha untuk memperoleh legitimasi melalui pengungkapan, berharap pada akhirnya akan tetap *going concern*.

Teori legitimasi didasarkan pada gagasan bahwa organisasi bisnis adalah yang dibangun secara sosial dimana masyarakat memiliki ekspektasi implisit tertentu dari perusahaan (DiMaggio & Powell, 1991; Meyer & Rowan, h karena itu, organisasi harus mempertimbangkan harapan semua



partisipan dalam masyarakat secara umum, bukan hanya hak investor. Teori legitimasi mempengaruhi kebijakan pengungkapan perusahaan yang diperlukan oleh pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan (Bradley, 2004). Perusahaan menerbitkan jumlah pengungkapan sukarela yang lebih besar untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan untuk kasus-kasus dimana pengungkapan wajib perusahaan tidak mencukupi (Cheung *et.al*, 2010). Dalam kaitan ini, pengungkapan berkelanjutan berfungsi sebagai alat untuk melegitimasi kegiatan bisnis yang menunjukkan bahwa pelapor beroperasi dalam norma dan nilai yang dapat diterima masyarakat.

Banyak penelitian tentang *sustainability reporting* menggunakan teori legitimasi untuk menjelaskan penelitiannya. Teori legitimasi juga merupakan salah satu teori yang dapat memberikan motivasi kepada manager atau perusahaan dalam mengungkapkan laporan berkelanjutan. Teori ini sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi. Selain itu legitimasi juga dapat memberikan batasan-batasan kepada organisasi atau kelompok-kelompok mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial dalam memperhatikan lingkungan.

Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka agar dapat memberikan kesan bahwa perusahaan telah memenuhi tanggungjawab lingkungan, sehingga keberadaan perusahaan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat (Wibowo & Faradiza, 2014). Dengan adanya penerimaan dari masyarakat ini diharapkan perusahaan mampu meningkatkan nilai perusahaan dan laba perusahaan. Apabila suatu perusahaan atau organisasi dapat melakukan pengungkapan sosialnya maka keberadaan perusahaan tersebut akan dapat “status” dari masyarakat atau dimana perusahaan tersebut beroperasi (Chariri & Ghozali, 2014)



2.1.2 Agency Theory (Teori Keagenan)

Eksposisi teoritis secara mendetail dari teori keagenan dinyatakan pertama kali oleh Jensen and Meckling (1976), menyebut manajer satu perusahaan sebagai 'agen' dan pemegang saham sebagai 'prinsipal'. Pemegang saham yang merupakan principal mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan perwakilan atau agen dari pemegang saham. Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan seperti ini adalah bahwa agen tidak selalau membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik principal (Warsono *et. al*, 2009).

Teori agensi merupakan suatu konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk melakukan semua aktivitas/kegiatan atas nama prinsipal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Baik *principal* maupun *agent* merupakan pelaku utama dalam pasar saham dan masing-masing memiliki *bargaining position* dalam menempatkan posisi, peran dan kedudukannya. Jika *principal* berperan sebagai pemilik modal yang memiliki akses informasi internal perusahaan, maka *agent* berperan sebagai pelaku dalam praktik operasional yang memberikan informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh (Ayu, 2012).

Selanjutnya, Putri dan Nasir (2006) menjelaskan bahwa manajer berkewajiban dalam memberikan informasi tentang kondisi perusahaan kepada pemilik modal sebagai wujud dari tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, namun informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya sehingga memicu terjadinya konflik keagenan yang



likenal sebagai asimetri informasi.

nya masalah asimetri informasi yang beredar luas, sehingga diperlukan menjelaskannya. Seperti yang dikemukakan oleh Cormiet *et al*. (2005)

dan Simmon *et al.* (2018), praktik pengungkapan berkelanjutan adalah suatu fenomena yang kompleks, untuk itu tidak dapat dijelaskan hanya dengan mengandalkan teori tunggal saja. Dengan demikian, sesuai dengan penelitian sebelumnya (Kuzey & Uyar, 2017; Matuszak *et al.*, 2019; Mahmood & Orazalin, 2017; Reverte, 2009; Ruhnke & Gabriel, 2013) menggunakan multi-teori untuk menyelidiki sejauh mana dan faktor penentu pengungkapan kinerja keberlanjutan yang dilaporkan oleh perusahaan publik di Indonesia.

Lebih lanjut Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan tentang penentuan kontrak yang paling efisien yang bisa membatasi konflik atau masalah keagenan. Perusahaan yang menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah cenderung akan melaporkan laba lebih rendah atau dengan kata lain akan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan manajemen, salah satunya biaya yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat (Anggraini, 2014).

Teori agensi mengamsusikan semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Principal menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas modal yang diinvestasikannya. Sedangkan manajer sebagai agen menginginkan kepentingannya dapat terpenuhi dengan pemberian kompensasi, bonus, insentif dan remunerasi yang sebesar-besarnya atas kinerjanya. Dengan demikian muncullah konflik kepentingan antara principal dan agen (Aziz, 2014).

Pengungkapan *sustainability report* adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pihak agen kepada principal, selain dari pembuatan *annual report* (AR). Hanya saja SR bersifat *voluntary* sedangkan AR bersifat *mandatory disclosure*. Orientasi perusahaan saat ini bukan hanya semata-mata mencari *profit* beralih ke *triple bottom-line* (3P).



2.1.3 Financial Performance

Financial performance (kinerja keuangan) merupakan gambaran informasi setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan guna menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif yang tercermin dalam laporan keuangan. Kinerja keuangan digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, dengan analisis yang memerlukan beberapa tolak ukur seperti rasio dan indeks, untuk menghubungkan data keuangan antara satu dengan yang lain berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan (Sawir, 2005: 1). Lebih lanjut Fahmi (2012: 2) menjelaskan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Kinerja keuangan digunakan oleh manajemen sebagai pedoman dalam mengelola sumber daya. Kinerja keuangan dibuat untuk menggambarkan kondisi perusahaan di masa lalu dan digunakan untuk memprediksi kondisi keuangan perusahaan di masa depan. Jika laporan tersebut menunjukkan hasil yang baik secara konsisten dari waktu ke waktu maka kinerja keuangan perusahaan tersebut dapat dikatakan baik.

Susanto dan Tarigan (2013) berpendapat kinerja keuangan merupakan suatu hasil keputusan yang didapat berdasarkan penilaian terhadap kemampuan suatu perusahaan, baik dari aspek profitabilitas, likuiditas, aktivitas, dan solvabilitas yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Fahmi (2012) menambahkan bahwa kinerja keuangan merupakan cerminan bentuk pencapaian



atas aktivitas yang dilakukan.

Jukuran kinerja suatu perusahaan biasanya dilihat dari kinerja keuangan

yang tercermin dari berbagai rasio. Salah satu indikator tolak ukur

kinerja keuangan yang sering digunakan adalah profitabilitas perusahaan. *Return on Asset* (ROA) menggambarkan kemampuan aset yang dimiliki perusahaan menghasilkan laba. *Return on Equity* (ROE) menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang bisa diperoleh pemegang saham. Selain itu, ada juga *Earning per Share* (EPS) dan *Price Earnings Ratio* (PER) yang juga merupakan ukuran untuk menentukan bagaimana pasar memberi nilai/harga terhadap saham yang beredar. Untuk mengetahui penilaian kinerja keuangan secara menyeluruh, maka dikembangkan sebuah alat analisis yang berkenaan dengan kesehatan kinerja keuangan dengan menggunakan analisis *Economic Value Added* (EVA).

EVA mencoba mengukur nilai tambah yang dihasilkan dengan cara mengurangi laba operasi setelah pajak dengan beban biaya modal, dimana beban biaya modal mencerminkan tingkat resiko perusahaan yang timbul sebagai akibat investasi yang dilakukan. EVA diklaim mampu menutupi kelemahan dari analisis rasio keuangan sehingga kedua alat pengukur kinerja keuangan dapat membantu pihak-pihak yang bersangkutan.

EVA didefinisikan sebagai kelebihan laba setelah pajak terhadap tingkat pengembalian minimum yang diinginkan investor (Anand *et.al.*, 1999). Konsep EVA merupakan pendekatan baru dalam menilai kinerja perusahaan dengan memperhatikan secara adil ekspektasi para penyandang dana. Metode EVA pertama kali dikembangkan oleh Steward dan Stern, seorang analisis keuangan dari perusahaan Stern & Steward Co. pada tahun 1993. Di Indonesia, metode EVA dikenal dengan metode NITAMI (Nilai Tambah Ekonomi). EVA/NITAMI adalah metode manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu



yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya tercipta manakala mampu memenuhi biaya operasi dan biaya modal (Tunggal, 2001).

ringkas, bertambah atau tidaknya nilai tambah suatu perusahaan

ahui dengan cara sebagai berikut (Utama, 1997):

1. Apabila $EVA > 0$, maka telah terjadi proses nilai tambah ekonomis pada perusahaan setelah perusahaan membayar semua kewajiban para penyandang dana.
2. Apabila $EVA = 0$, maka menunjukkan posisi “impas” pada penerimaan perusahaan, tetapi perusahaan mampu membayarkan semua kewajiban para penyandang dana atau kreditur sesuai ekpektasinya.
3. Apabila $EVA < 0$, maka hal ini menunjukkan tidak terjadinya proses nilai tambah pada perusahaan karena laba yang tersedia tidak bisa memenuhi harapan penyandang dana.

2.1.4 Sustainability Report

Sustainability report (SR) atau Laporan Keberlanjutan merupakan laporan yang diterbitkan oleh entitas organisasi atau perusahaan dimana terdapat tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang disebabkan karena kegiatan perusahaan sehari-hari. Disamping itu, SR dianggap pula sebagai akuntabilitas dan transparansi emiten dan perusahaan publik atas dampak operasi terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial. Pelaporan keberlanjutan yang dipromosikan GRI (*Global Reporting Initiative*) adalah praktik pelaporan organisasi secara transparan mengenai dampak ekonomi, lingkungan dan sosialnya yang dipandang sebagai suatu kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Konsep keberlanjutan menurut Whitehead (2006) adalah sebagai hasil masyarakat yang memungkinkan generasi mendatang setidaknya tetap memiliki kekayaan alam yang sama dengan generasi yang ada pada saat ini. Ia menyatakan bahwa keberlanjutan tidak berarti kemudian memerlukan sumber daya yang sedemikian khusus, melainkan hanya kecukupan sumber daya (kombinasi dari sumber daya manusia, fisik



setidaknya sama baiknya dengan generasi saat ini. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu adanya sebuah informasi terkait aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi sebagai bentuk transparansi dalam pelaporan kinerja perusahaan. Perusahaan harus mengumpulkan, mengendalikan dan melaporkan ke pihak internal maupun eksternal tentang informasi keberlanjutan yang mereka miliki dalam *sustainability report*.

Kebutuhan informasi tentang perusahaan tidak hanya laporan keuangan saja, informasi non-keuangan mulai diperlukan dan mendapat perhatian stakeholder dalam proses pengambilan keputusan (Martani *et.al.*, 2016). Seiring terjadinya kerusakan lingkungan seperti perubahan iklim dan pemanasan global, kalangan masyarakat dan investor memerlukan informasi mengenai kegiatan perusahaan dalam mengelola lingkungan, agar mereka dapat memastikan bahwa kegiatan perusahaan tidak merugikan dan merusak lingkungan. Pelaporan ini diungkapkan dalam laporan tahunan atau membuat laporan terpisah tentang kegiatan non-keuangan.

Laporan berkelanjutan (*sustainability report*) memuat tentang kinerja keuangan dan informasi kinerja non-keuangan yang meliputi aspek sosial dan lingkungan yang dapat memungkinkan perusahaan berjalan secara berkesinambungan (Elkington, 1997). Laporan keberlanjutan yang disusun berdasarkan kerangka pelaporan GRI mengungkapkan keluaran dan hasil yang terjadi dalam suatu periode tertentu dalam konteks komitmen organisasi, strategi, dan pendekatan manajemennya (GRI, 2006: 3). *Sustainability report* dikenal dengan sebutan *triple bottom line* yaitu suatu konsep yang menekankan pada 3P (*profit*, *people*, dan *planet*). Perusahaan yang ingin operasionalnya berkelanjutan,



ingin mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan harus memenuhi kebutuhan masyarakat (*people*), dan turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan (*planet*).

Sustainability report mengalami perkembangan yang pesat. Pelaporan ini membahas tentang lingkungan, kesehatan, dan *safety* setiap tahunnya. Menurut GRI, laporan berkelanjutan akan menjadi upaya perusahaan untuk menggambarkan laporan ekonomi, lingkungan dan sosial. Selain di perusahaan, laporan ini juga digunakan dalam instansi pemerintah dalam membuat penilaian di setiap pelaporan organisasinya.

GRI (*General Reporting Initiative*) merupakan lembaga organisasi internasional yang kegiatan utamanya berfokus pada pencapaian transparansi mengenai pengungkapan standar dan pedoman pelaporan berkelanjutan. Permintaan kepada perusahaan tentang pengungkapan yang lebih transparan dapat memunculkan tekanan kepada perusahaan untuk mengumpulkan, mengendalikan dan mempublikasikan tentang informasi berkelanjutan yang mereka miliki. Dalam kerangka GRI, laporan berkelanjutan memiliki manfaat antara lain:

- 1) Sebagai batasan kinerja organisasi agar memperhatikan hukum, norma, Prakarsa sukarela, standar kinerja dan undang-undang.
- 2) Untuk membandingkan kinerja organisasi setiap periode.
- 3) Untuk mendemonstrasikan komitmen organisasi dalam pembangunan berkelanjutan.

Saat ini, implementasi *sustainability report* di Indonesia telah didukung oleh pemerintah melalui aturan yang tertuang dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007. Dalam mendukung praktik pelaporan aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka dibutuhkan suatu pedoman dalam menyusun *sustainability report*. Salah satu pedoman yang digunakan adalah GRI-



pedoman ini berlaku secara global. Untuk menghasilkan penerapan berkelanjutan yang efektif, emiten dan perusahaan publik didorong untuk kan delapan prinsip di bawah ini sebagai panduan:

1) Prinsip Investasi Bertanggung Jawab

Investasi bertanggung jawab (*responsible investment*) adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor ekonomi, lingkungan hidup, sosial dan tata kelola dalam keputusan investasi yang bertujuan agar dapat mengelola risiko secara lebih baik.

2) Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan

Emiten dan perusahaan publik harus menetapkan dan menerapkan strategi dan praktik bisnis berkelanjutan pada setiap pengambilan keputusan dengan menekankan pencapaian tujuan jangka panjang dan penetapan strategi jangka pendek yang merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan jangka panjang. Strategi dan praktik bisnis dimaksud meliputi visi, misi, struktur organisasi, rencana strategis, standar prosedur operasional, program kerja sampai pada penetapan faktor risiko dalam manajemen risiko. Penerapan strategi bisnis tersebut ditujukan untuk meminimalkan dampak negatif dan mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.

3) Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup

Emiten dan perusahaan publik harus memiliki prinsip kehati-hatian dalam mengukur risiko sosial dan lingkungan hidup dari aktivitas operasi perusahaan. Risiko sosial dan lingkungan hidup mencakup dampak sosial dan lingkungan hidup yang bersifat negatif dari kegiatan operasi perusahaan.

4) Prinsip Tata Kelola

Emiten dan perusahaan publik harus menerapkan tata kelola keberlanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yaitu transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, independen, profesional, setara dan wajar.



Komunikasi yang Informatif

Emiten dan perusahaan publik harus menyiapkan dan menyediakan laporan keberlanjutan perusahaan. Laporan harus mudah dipahami, dapat

dipertanggungjawabkan dan disampaikan melalui media komunikasi yang efektif dan dapat dijangkau oleh seluruh pemangku kepentingan. Dalam kaitan ini, pelaporan yang wajib disusun oleh emiten dan perusahaan publik adalah laporan keberlanjutan sebagaimana dijelaskan dalam pedoman teknis ini.

6) Prinsip Inklusif

Emiten dan perusahaan publik harus berupaya untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan produk/atau jasa sehingga dapat diakses oleh konsumennya.

7) Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas

Dalam menyusun program keberlanjutan, emiten dan perusahaan publik harus mempertimbangkan sektor-sektor unggulan prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian TPB (SDGs).

8) Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi

Dalam rangka menyelaraskan strategi/kebijakan, peluang bisnis, dan inovasi produk dengan kepentingan nasional, emiten dan perusahaan publik aktif dalam forum/kegiatan/kerjasama terkait bisnis berkelanjutan, baik dalam tingkat regional, nasional maupun lokal.

Dalam penelitian ini, SEOJK No.16 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Januari 2021 lalu, digunakan sebagai standar pedoman teknis penyusunan laporan keberlanjutan tentang Isi dan Bentuk Laporan Tahunan bagi emiten dan perusahaan publik. Total seluruh pengungkapan laporan keberlanjutan tersebut di rinci dalam 34 item. Item dari tindakan tanggungjawab



eliputi 3 komponen aspek kinerja yaitu:

ek kinerja ekonomi yang terbagi menjadi:

Kuantitas produksi atau jasa

- b) Pendapatan atau penjualan
- c) Laba atau rugi bersih
- d) Produk ramah lingkungan
- e) Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses Bisnis Keuangan Berkelanjutan

2. Aspek kinerja lingkungan hidup

- a) Aspek umum
- b) Aspek material
- c) Aspek energi
- d) Aspek keanekaragaman hayati
- e) Aspek emisi
- f) Aspek limbah dan efluen
- g) Aspek pengaduan terkait lingkungan

3. Aspek kinerja sosial

- a) Kinerja sosial
- b) Aspek ketenagakerjaan
- c) Aspek masyarakat
- d) Tanggung jawab pengembangan produk dan jasa berkelanjutan

2.1.5 Good Corporate Governance

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* tahun 2001 mendefinisikan *Good Corporate Governance (GCG)* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur tiga hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan lainnya internal dan eksternal yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban



angan kata lain, GCG merupakan suatu sistem yang mengendalikan r dengan tujuan untuk dapat menciptakan nilai tambah bagi semua berkepentingan (*stakeholders*).

Jika suatu *corporate governance* diterapkan dengan baik dalam suatu perusahaan, maka pengawasan terhadap perusahaan tersebut akan semakin baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut maka perusahaan harus dapat menerapkan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam GCG berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 pasal 3 tentang penerapan praktik *corporate governance* secara umum meliputi lima prinsip, yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*.

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi), merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Independency* (Kemandirian), merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. *Accountability* (Akuntabilitas), merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. *Responsibility* (Pertanggungjawaban), merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (Kewajaran), merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2.1.4.1 Dewan Komisaris Independen (KOMIND)

Komponen Dewan Komisaris yang terdapat di dalam organisasi suatu perusahaan memiliki tugas untuk mengawasi dan menasehati kinerja Dewan Direksi dalam menjalankan sebuah perusahaan. Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam *corporate governance*, karena hukum perseroan memusatkan urusan dan tanggung jawab legal perusahaan kepada dewan komisaris. *System dual-board (two-tier)* merupakan sistem yang digunakan perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam struktur organisasi internal perusahaannya, yang satu dikenal sebagai dewan komisaris dan yang lainnya dikenal dengan dewan direksi.

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan bukan merupakan pegawai serta tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan kepemilikan saham. Dalam praktik *corporate governance* mengharuskan adanya komisaris independen dalam perusahaan yang diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, objektif, serta dapat menempatkan kesetaraan sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan para pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya.

2.1.4.2 Independensi Komite Audit (AUDIND)

Berdasarkan Keputusan Direksi BEJ No. Kep-315/BEJ/06/2000 menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan, dan penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam perusahaan. Sesuai dengan ketentuan yang ada di Indonesia, direksi merupakan ketua komite audit. Komite audit merupakan perpanjangan dari dewan direksi (Manuputty, 2012).



Salah satu karakteristik komite audit yaitu independensi komite audit. Independensi merupakan karakteristik komite audit terpenting yang harus dimiliki dalam memenuhi peran pengawasannya terhadap manajemen perusahaan yang juga akan memiliki dampak pada baik buruknya kinerja perusahaan. Independensi komite audit sejalan dengan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (Manuputty, 2012) yang mensyaratkan minimal dua anggota komite audit yang berfungsi sebagai ketua dan anggota komite audit. Selain itu, berdasarkan keputusan ketua Bappepam No: KEP-41/PM/2003 tanggal 23 Desember 2003 yang mengatur mengenai komite audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang lain yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

2.2 Tinjauan Empiris

Untuk mendukung hubungan variabel eksogen terhadap variabel endogen maka dilakukan tinjauan empiris. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. *Sustainability reporting in Smart Cities: A Multidimensional Performance Measures* (Buallay *et.al.*, 2021). Penelitian ini menguji hubungan tingkat SR dengan kinerja perusahaan di 20 Top *Worldwide Smart Cities* dimana SR diukur melalui ESG Score. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara ESG score dengan *operational and financial performance* (kinerja operasional dan keuangan), Penelitian ini menunjukkan bahwa hanya *market performance* yang tidak memiliki pengaruh terhadap ESG Score.

2. *Economic, Environmental, and Social Performance Indicators of Sustainability*



Reporting: Evidence from Russian Oil and Gas Industry (Mahmood & Orazalin,

Penelitian ini menyelidiki praktik pengungkapan keberlanjutan yang

an untuk mengetahui sejauh mana praktik SR dari perusahaan publik

minyak dan gas terbesar di Rusia. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa faktor utama dalam penyebaran informasi keberlanjutan di Rusia adalah perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung mengungkapkan informasi keberlanjutan yang lebih transparan daripada perusahaan yang hanya dimiliki oleh investor lokal. Dengan adanya kepemilikan asing mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan SR.

3. *The Relationship Between Firm Characteristics and the Disclosure of Sustainability reporting* (M. C. Wang, 2017). Dilatarbelakangi oleh karakteristik perusahaan yang beragam agar dapat memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa tujuh *corporate governance* dan karakteristik bisnis, yaitu ukuran dewan direksi, rasio direktur independen, komite audit, rasio pendapatan ekspor, persentase kepemilikan pemegang saham asing, aset tetap, dan pertumbuhan perusahaan berhubungan positif terhadap pengungkapan pelaporan SR. Studi ini juga mendukung gagasan bahwa dengan adanya keterlibatan dari pemangku kepentingan erat kaitannya dengan pengungkapan pelaporan keberlanjutan.
4. *Social Responsibility and Financial performance: The Role of Good Corporate Governance* (Mercedes, 2015). Penelitian ini ingin membuktikan secara empiris dengan menyelidiki hubungan dua arah antara CSR dan kinerja keuangan pada perusahaan yang terdaftar Spanish pada MSE (*the Madrid Stock Exchange*). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa semua kebijakan sosial dapat meningkatkan sumber daya keuangan, begitupun sebaliknya. Kinerja keuangan dapat meningkatkan pemanfaatan sosial yang lebih besar. Dengan mempertimbangkan investasi dan sumber daya keuangan dalam



nbangkan kebijakan yang meningkatkan tingkat komponen sosial agar berkontribusi pada peningkatan masyarakat secara global.

*ability reporting and Financial performance in Malaysian Public Listed
nies* (Kasbun, 2016). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa beberapa

perusahaan melaporkan keberlanjutan pada ekonomi, sosial dan lingkungan pada tahun-tahun sebelumnya namun tidak pada tahun ini. Adanya inkonsistensi dalam melaporkan keberlanjutan akan berdampak

6. *Focus and Standardization of Sustainability reporting – A Comparative Study of United Kingdom and Finland* (Mathias, 2012). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pelaporan keberlanjutan dari 100 perusahaan terbesar di Inggris dan Finlandia, sebab keduanya merupakan negara yang sangat maju di Eropa Barat Laut, tetapi dengan sistem budaya dan sosial-ekonomi yang berbeda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara empiris dampak keseluruhan dari budaya dan sosial-ekonomi pada praktik pelaporan beragam. Budaya berorientasi pada pemegang saham yang lebih kuat tidak mengarah ada inklusi yang lebih luas dari masalah ekonomi dalam pelaporan keberlanjutan, sementara cakupan pelaporan lingkungan bergantung pada lingkungan itu sendiri. Dampak faktor budaya dan sosial-ekonomi yang diberikan dari penerapan standar GRI pun tampaknya terbatas.
7. *Influence of Corporate Governance in Corporate Social Responsibilities Relation with Firm Value* (Sallata et.al., 2020). Dilatarbelakangi oleh fenomena CSR yang semakin meluas dan telah menarik perhatian dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah, pebisnis, hingga mass media. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sementara *corporate governance* menunjukkan hal yang sebaliknya. Kurangnya implementasi dari *corporate governance* memberikan dampak negatif terhadap hubungan CSR dengan *corporate value*.
8. *Doing Well by Doing Good: Can Voluntary CSR Reporting Enhance Financial*



ance? (Mukherjee & Nuñez, 2019). Penelitian ini menguji pengaruh an laporan CSR dengan kinerja keuangan pada 173 perusahaan India tingkat resiko lingkungan yang berbeda. Hasil penelitian dikasikan bahwa tingkat resiko lingkungan yang tinggi mengadopsi GRI

dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki tingkat resiko lingkungan rendah. Tidak terdapatnya hubungan signifikan antara laporan GRI dengan kinerja keuangan pada tingkat menengah.

9. *Between Cost and Value, Investigating the Effects of Sustainability reporting on Firm's Performance* (Amina Buallay, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan *sustainability reporting* dengan *firm's financial, operational, dan market performance* untuk menentukan kapan memberikan manfaat dan kapan menambahkan biaya. Hasilnya menunjukkan bahwa ESG secara positif berpengaruh terhadap *market performance* dan berpengaruh negatif terhadap *financial dan operational performance*.
10. *Determinants of GRI-based Sustainability reporting: Evidence from an Emerging Economy* (Nurlan Orazalin and Monowar Mahmood, 2019). Penelitian ini ingin menyelidiki sejauh mana faktor penentu pengungkapan *sustainability reporting* yang dilaporkan oleh perusahaan publik di Kazakhstan dengan menggunakan pedoman GRI. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor penentu seperti pelaporan yang berdiri sendiri, Bahasa pelaporan, profitabilitas perusahaan, ukuran perusahaan, dan jenis auditor secara substansial mempengaruhi tingkat, sifat, dan kualitas praktik pelaporan *sustainability report* perusahaan di Kazakhstan. Dengan mengikuti pedoman dari GRI akan memudahkan perusahaan dalam pengungkapan kinerja keberlanjutannya.
11. *A Meta-Analysis of Environmentally Sustainable Supply Chain Management Practices and Firm Performance* (Golicic & Smith, 2013). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya perusahaan yang menimbang implementasi praktik berkelanjutan secara internal dan dinasi dengan perusahaan lain dengan menghubungkan kelestarian dengan kinerja perusahaan. Hasil penelitiannya yang lebih dari 20 menemukan asosiasi positif dan negatif.



12. *Does ESG Performance Have an Impact on Financial performance? Evidence from Germany* (Velte, 2017). Penelitian ini berfokus pada kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESGP) secara total dan dibagi dalam setiap komponen dan mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja keuangan (FINP) dengan menggunakan perusahaan yang terdaftar di German Prime Standard. Hasilnya menunjukkan ESGP berdampak positif pada ROA tetapi tidak berdampak pada Tobin's Q. Selain itu, dengan menganalisis tiga komponen ESGP yang berbeda, kinerja tata kelola memiliki pengaruh terkuat pada FINP dibandingkan dengan kinerja lingkungan dan sosial.
13. *Environmental Corporate Social Responsibility and Financial performance: Disentangling Direct and Indirect Effect* (Lioui & Sharma, 2012). Penelitian ini menguji dampak tanggung jawab ECSR terhadap kinerja keuangan perusahaan (CFP) yang diukur dengan ROA dan Tobin's Q. Hasil penelitian menunjukkan hubungan antara ROA dan ESCR, kekuatan dan kekhawatiran berpengaruh negatif dan signifikan.
14. *Environmental, Social and Governance Transparency and Firm Value* (Yu et.al., 2018). Penelitian ini menyelidiki transparansi lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) dan mengukur sejauh mana pengungkapan ESG berdampak pada nilai perusahaan pada 1996 sampel perusahaan di 47 negara maju dan berkembang. Secara empiris menunjukkan bahwa manfaat dari pengungkapan ESG lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk rata-rata perusahaan yang terdaftar. Selain itu, penelitian ini menemukan bukti pendukung dalam pengungkapan isu ESG. Perusahaan dengan ukuran aset yang lebih besar, likuiditas yang lebih baik, intensitas R&D yang lebih tinggi, kepemilikan orang yang lebih sedikit, dan kinerja keuangan masa lalu akan lebih terdorong dalam transparansi mengenai isu LST.



Disclosure and Financial performance Revisited: A Cross Country
 Study (Beck et.al., 2018). Penelitian ini mengkaji hubungan antara

keterlibatan CSR perusahaan (diukur dengan keragaman dalam praktik pengungkapan sukarela) terhadap kinerja keuangan yang diukur dari tiga yurisdiksi pelaporan negara: Australia, Hong Kong, dan Inggris, dengan menggunakan pedoman GRI untuk menilai CSR perusahaan dan kontrol CSR untuk menilai kinerja CSR aktual dengan menggunakan peringkat keberlanjutan CSR Vigeo-Eiris. Dari 116 perusahaan publik yang dijadikan sampel, hasilnya menemukan bahwa adanya keterlibatan CSR dalam mengindikasikan kinerja CSR aktual. Selain itu, terdapat hubungan yang signifikan antara keterlibatan CSR dengan kinerja keuangan.

16. *The Influence of Social and Environment Performances on Financial performance* (Rosyid, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja sosial dan lingkungan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan dan industri di BEI. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif kinerja lingkungan dan kinerja sosial terhadap kinerja keuangan secara bersama-sama. Semakin meningkat kinerja lingkungan dan sosial, maka akan semakin meningkat pula kinerja keuangannya.

17. *A New Look at Corporate Social-Financial performance Relationship: The Moderating Roles of Temporal and Interdomain Consistency in Corporate Social Performance* (Wang & Choi, 2013). Penelitian ini mengembangkan suatu argument bahwa pembentukan hubungan *stakeholder* tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat *corporate social* suatu perusahaan tetapi juga oleh kemampuan kinerja sosial yang konsisten. Dengan menggunakan sampel 622 perusahaan dan 2.365 pengamatan berdasarkan data Kinder, Lydenberg, Domini & Co. menemukan hasil empiris yang mendukung argument tersebut. Selain itu juga



menemukan bahwa mempertahankan kinerja sosial yang baik secara konsisten penting bagi perusahaan yang diikuti dengan tingkat intensitas perhatian yang tinggi.

18. ESG Disclosure and Firm Performance Before and After IR: The Moderating Role of Governance Mechanism ((Albitar *et.al.*, 2020). Penelitian ini menguji dampak dari pengungkapan lingkungan, sosial dan *governance* (ESGD) terhadap kinerja keuangan perusahaan (FP) sebelum dan setelah pengenalan laporan terintegrasi (IR). Hasilnya menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara skor ESGD dan sebelum dan setelah 2013. Di samping itu, perusahaan yang secara sukarela terkait dengan IR memiliki kecenderungan untuk mencapai kinerja keuangan perusahaan yang lebih baik

